

Legal Protection for Victims of Violence in Public Transportation: Perspective of the Indonesian Criminal Code and Law No. 31 of 2014

Author¹, swonogiri sihaloho², Marcello Gilbert Bregint Barus³

¹Department of XYZ, College/University Name, Place-Pin Code, (State) Country

²Department of XYZ, College/University Name, Place-Pin Code, (State) Country

*E-mail : e-mail id of Corresponding Author please mention here

ARTICLE INFO ABSTRACT

Received: Violence in public transportation remains a persistent issue in Indonesia, affecting passengers' sense of safety, particularly among women and vulnerable groups. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for victims of violence in public transportation from the perspective of the Indonesian Criminal Code and Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the legal framework is normatively adequate, its implementation remains ineffective. The Criminal Code primarily focuses on punishing perpetrators and lacks provisions for victim recovery, while Law No. 31 of 2014 provides more comprehensive protection but faces challenges in practice, such as limited public awareness, lack of coordination among institutions, and procedural complexity. The study concludes that strengthening implementation, improving institutional coordination, and enhancing victim-oriented legal approaches are essential to ensure effective protection for victims in public transportation.

Accepted:

Published:

Keyword:
Legal Protection;
Victims of
Violence; Public
Transportation;
Criminal Law;
Indonesia

INFO ARTIKEL ABSTRAK

Diterima: Kekerasan di transportasi umum tetap menjadi masalah yang terus-menerus di Indonesia, yang memengaruhi rasa aman penumpang, terutama di antara

Diterima: perempuan dan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan di depan umum

Kata kunci: _____
perlindungan
hukum; Korban
Kekerasan;
Transportasi
Umum; Hukum
Pidana; Indonesia

Diterbitkan: transportasi dari perspektif KUHP Indonesia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum secara normatif memadai, implementasinya tetap tidak efektif. KUHP terutama berfokus pada menghukum pelaku dan tidak memiliki ketentuan pemulihan korban, sedangkan UU No. 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif tetapi menghadapi tantangan dalam praktiknya, seperti keterbatasan kesadaran publik, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kompleksitas prosedural. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan peningkatan pendekatan hukum yang berorientasi pada korban sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban dalam transportasi umum.